

KENDALA PELAKSANAAN "GIJZELING" SEBAGAI SALAH SATU SANKSI DALAM HUKUM PAJAK

Wida Astuti

Abstract

Gijzeling or hostage institution in taxing law constitutes the government's effort in increasing the State's income from taxing sector. As one of the state's cash inflow sources, the tax finally is utilized for development for the sake of public welfare and prosperity. The state often suffers from lost since there are some tax obligators forgetting to pay tax, even tends to avoid their obligation in paying tax. Thus, the government establishes a mechanism providing compulsory power for the tax obligator, namely *Gijzeling* or Lembaga Paksa Badan (Agency Compulsory Institution). In *gijzeling* implementation there are some constraints: the absence of special place for hostage, cultural factor in which the taxing apparatus is less firm, and there is still any justice mafia that enables some parties conducting some approaches.

Keywords: *Gijzeling*, *Lembaga Paksa Badan* (Agency Compulsory Institution), Tax Sanction

A. Pendahuluan

Latar belakang penerapan *Gijzeling* dalam hukum pajak adalah didasarkan pada kenyataan yang tak bisa dipungkiri bahwa Negara kerap kali sulit untuk memungut pajak karena banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui surat pemberitahuan pajak, namun terkadang wajib pajak tetap saja lalai untuk membayar pajak, bahkan cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

Dalam beberapa tahun ini akibat krisis moneter/ekonomi di Indonesia banyak perusahaan atau perorangan yang mengalami kesulitan membayar pajak.

Hal ini mungkin terjadi karena memang tidak mampu, akan tetapi tidak jarang yang tidak membayar pajak karena mereka tidak mau membayar atau tidak beritikad baik untuk membayar pajak. Padahal sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa, karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas Negara yang pada akhirnya dipergunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini mendorong pemerintah untuk menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang "bandel". Salah satu mekanisme

tersebut yaitu *Gijzeling* atau Lembaga Paksa Badan.

B. Pengertian dan Landasan Hukum *Gijzeling*

Gijzeling atau lembaga penyangkutan sering juga disebut *lifsdwang* atau paksa badan atau sandera badan (UU No. 49/Prp/1960 jis Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 336/KMK.01/2000). Istilah *Gijzeling* itu sendiri berasal dari istilah Belanda yang berarti "Sandera" (PERMA No. 2 Tahun 1964 dan PERMA No. 4 Tahun 1974). Pengaturan lembaga *Gijzeling* atau sandera badan sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka masih berlaku berdasarkan Pasal 11 aturan peralihan UUD 1945.

Lembaga penyangkutan diatur dalam Pasal 209 – Pasal 223 HIR serta Pasal 242 – Pasal 257 R.Bg. ketentuan tersebut pada tahun 1964 diberlakukan oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Sila pertama Pancasila. Namun lembaga ini kemudian dihidupkan kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000.

Lembaga Paksa Badan oleh berbagai peraturan perundang-undangan diartikan bermacam-macam. Undang-Undang No. 19

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa mengartikan paksa badan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu, Undang-undang ini menggunakan istilah penyanderaan (Pasal 1 angka 18 UU No. 19 Tahun 2000). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 mengartikan paksa badan (*lifsdwang*) sebagai upaya penagihan dalam rangka menyelamat-

kan uang Negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di suatu tempat tertentu, terhadap Debitur yang tergolong mampu namun beritikad tidak baik (Pasal 1 angka 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.01/2000).

Saat ini Paksa Badan diketemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai nampak dalam Matrik di bawah ini.

ATURAN MENGENAI PAKSA BADAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Peraturan	Pasal	Pokok Pengaturan
<i>Reglement Buitengewesten, (RBg), Herziene Inlandsch Reglement (HIP).</i>	Pasal 209 dan 210	Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitor.
UU No. 49/Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang negara	Pasal 1	Penyanderaan dalam rangka utang kepada Negara
Perma No. 1 Tahun 2000 tentang pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975	Pasal 1	Upaya menghidupkan kembali lembaga gijzeling terhitung sejak 30 Juni 2000 paksa badan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa	Pasal 33 ayat 1 dan 2	Penyanderaan terhadap pengutang pajak yang terhutang sekurang-kurangnya Rp. 100 juta dan diragukan itikad baiknya.
PP No. 137 Tahun 2000	Pasal 3	Penyanderaan dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau kepala Daerah Tingkat I.
SKB Menteri keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia No. M-02.UM.01 Tahun 2003 dan No. 294/KMK.03/2003 tentang tata cara penitipan penanggung pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.	Pasal 2	SKB ini hanya berlaku bagi daerah tempat penanggung pajak yang disandera dan belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Departemen Keuangan.
UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.	Pasal 93	Penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan.

Sumber : Pusat Data hukum online, 2004.

C. Pengaturan Gijzeling Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

Menurut undang-undang tersebut pengertian dari penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika, dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000).

Jelas dalam undang-undang ini penyanderaan dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh pemenuhan utang pajak oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Penyanderaan menurut undang-undang ini merupakan salah satu upaya paksa dan merupakan upaya terakhir dalam penagihan dengan surat paksa agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajaknya. (Ilyas Wirawan dan Ricard Burton, 2001: 40).

Penyanderaan ini merupakan salah satu penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. (Walauyo dan Wirawan, 2002: 69). Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik penanggung pajak. Indikasi itikad tidak baik tersebut antara lain penanggung pajak diduga menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak ada atau tidak cukup barang yang disita untuk jaminan pelunasan utang-utang pajak, atau terdapat dugaan yang kuat bahwa penanggung pajak akan melarikan diri (Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1998).

Tentang penyanderaan ini di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 diatur dalam Bab V (Pasal 33 s.d. Pasal 36). Adapun pokok-pokok pengaturan penyanderaan menurut ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat

jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
3. Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah izin tertulis Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
4. Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
5. Surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas penanggung pajak.
 - b. Alasan penyanderaan.
 - c. Izin penyanderaan.
 - d. Lamanya penyanderaan; dan
 - e. Tempat penyanderaan.
6. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadat atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.
7. Penanggung pajak yang disandera dilepas:
 - a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
 - b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi.
 - c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
8. Sebelum penanggung pajak dilepas pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam surat perintah penyanderaan.
9. Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan negeri.
10. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan dan putusan pengadilan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap, penanggung pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan anti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalannya.

11. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 34 adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.
12. perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 34 ditetapkan oleh Menteri.
13. penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.
14. penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak dan pemberian ganti rugi lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 137 Tahun 2000. dalam Peraturan Pemerintah tersebut tempat tertentu yang dijadikan tempat penyanderaan bagi penanggung pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tertutup dan terasing dari masyarakat.
2. Mempunyai fasilitas terbatas.
3. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa sebelum tempat penyanderaan dibentuk penanggung pajak yang disandera dititipkan di Rumah Tahanan Negara dan terpisah dari tahanan lain. Biaya penyanderaan dibebankan kepada penanggung pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak. Termasuk dalam biaya penyanderaan antara lain, biaya hidup selama dalam penyanderaan di rumah tahanan Negara dan biaya penangkapan dalam hal penanggung pajak melarikan diri dari rumah tahanan. (Galang Asmara, 2006: 78).

D. Kendala Dalam Pelaksanaan Gijzeling

Gijzeling atau lembaga penyanderaan ini meski sudah lama diatur tetapi banyak wajib pajak yang tidak memahami, apalagi masyarakat awam. Saat ini dalam praktek mekanisme penyanderaan dilakukan secara bertahap, pertama akan diberikan surat teguran jika tidak mendapat tanggapa 14 hari

kemudian akan diberikan surat paksa, selanjutnya kalau belum mau membayar juga dalam waktu 14 hari Ditjen Pajak akan mengajukan surat sita, dilanjutkan pelelangan, pencegahan dan penyanderaan. penyanderaan sebagai alat paksa yang akan diterapkan terakhir apabila alat paksa lainnya tidak dapat ditetapkan. Untuk wilayah Surakarta sanksi ini belum pernah terjadi sedang untuk kantor pajak pusat (Jakarta) juga masih sangat sedikit.

Ada beberapa hal yang menurut penulis menjadi kendala dalam pelaksanaan *gijzeling*:

1. Belum adanya tempat khusus untuk penyanderaan.

Undang-undang tentang penagihan pajak dengan surat pajak yang didalamnya mengatur tentang sandera, belum ada ketentuan tentang penagihan para sandera dalam sebuah tempat tertentu. Sementara itu menurut surat keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia ditentukan bahwa sambil menunggu tempat khusus untuk penyanderaan maka pelaksanaan penyanderaan dilakukan pada lembaga pemasyarakatan setempat dimana kantor wilayah pelayanan pajak yang mengeluarkan surat perintah penyanderaan itu berada.

2. Faktor Budaya atas Kurang tegasnya Aparat Perpajakan

Tegaknya suatu sistem hukum berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, seperti kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan. Juga sering diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu ditaati, dilanggar dan disimpangi. Tanpa budaya hukum yang kondusif maka suatu sistem hukum tidak akan efektif bahkan menjadi lumpuh. Apabila masyarakat mematuhi hukum tanpa kesadaran akan urgensi dan tuntutan nilai-nilai yang diyakininya maka penegakan hukum akan sia-sia. Bila kita kaitkan dengan korupsi sudah membudaya, merasuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dipahami sebab sebelum dijajah Belanda Negara kita adalah Negara kerajaan dengan sistem feodalisme, dimana seluruh kekayaan dianggap milik raja atau

penguasa yang memiliki. Dengan sistem tersebut para penguasa yang korup tak merasa bersalah karena mereka memiliki Negara. Budaya seperti ini di Belanda juga dikenal dengan nama *family system*, sedangkan di Amerika Serikat budaya seperti ini disebut *spoil system*.

Tidak mengherankan kiranya bila para elit yang memegang tampuk kekuasaan selama ini melakukan korupsi, sebab mereka merasa berjasa terhadap Negara ini apalagi selama 32 tahun pemerintahan orba meski kita sudah di alam kemerdekaan tapi sistem yang berlaku tetap feodal dan sekarang ini sedang terjadi perubahan dari feodalisme ke demokrasi, tapi konsep cultural masyarakat kita saat ini belum berubah masih bersifat feodal. Oleh karena itu harus ada perubahan konsep cultural secara bertahap, sebab berubah pikiran orang tidak secepat mengubah undang-undang, diperlukan waktu yang sangat lama, untuk itu harus terus menerus mengkampanyekan gerakan anti korupsi dan budaya malu.

Budaya korupsi di masyarakat kita sekarang ini telah melalui proses sosialisasi, internalisasi dan akhirnya masyarakat tidak sadar lagi bahwa semua telah merasuk ke dalam jiwanya. Korupsi akhirnya menjadi bagian dari *law of life*. Masyarakat tidak lagi menyadari korupsi karena norma-normanya *internalized*. Menerima hadiah, bonus sudah biasa padahal apa yang di kerjakan itu bagian dari tugasnya. Mestinya mereka sadar bahwa itu merupakan bagian dari *system management*. Memberikan hadiah pada yang tidak perlu diberi hadiah, dan memberikan motivasi pada mereka yang tidak perlu di beri motivasi, karena apa yang akan dikerjakan memang sudah kewajibannya.

Menurut Gunnar myrdal dalam Robert klitgaard, terdapat perubahan dalam adat istiadat mengenai dimana, bagaimana dan harapan mendapat keuntungan pribadi setiap Negara mempunyai criteria yang berbeda sehingga korupsi kurang dituntut ke pengadilan, lebih cepat diterima, atau barangkali bahkan merupakan dari adapt istiadatnya. Contoh, meluaskan korupsi di Meksiko

sebagai disebabkan karena disana orang lebih mementingkan hubungan-hubungan pribadi. Meluasnya personalisme di dalam masyarakat yaitu loyalitas primer kepada keluarga dan sahabat-sahabat bukan ke arah pemerintah atau badan administrasi, mempunyai dampak menentukan terhadap tingkat korupsi. Sebaliknya di Afrika, kebiasaan memberi hadiah kepada kepala suku merupakan salah satu adat istiadat. (Robert Klitgaard, 1998: 83).

Di Indonesia kondisi seperti itu juga terjadi, baik dalam organisasi ataupun dalam masyarakat. Sebagai contoh, disuatu bagian dari organisasi dan dapat muncul budaya uang pelicin, amplop, hadiah dan lain-lain yang mengarah keakibat yang tidak baik bagi orang. Budaya organisasi seperti ini akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikapnya dalam menghadapi sesuatu keadaan. Apabila kultur ini tidak ditangani dengan baik maka sejumlah organisasi mungkin akan melakukan berbagai bentuk perbuatan yang tidak baik yang lama kelamaan dianggap sebagai kebiasaan. (Sholahudin, 2003:8).

Demikian juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat konduktif untuk terjadinya korupsi. Misalnya banyak anggota masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari ternyata dalam menghargai seseorang lebih didasarkan pada kekayaan yang dimiliki orang yang bersangkutan. Ini dapat dilihat bahwa sebagian besar anggota masyarakat akan memberikan pelakuan yang berbeda terhadap seseorang dengan melihat penampilan atau kendaraan yang mewah. Juga apabila masyarakat mengetahui adanya orang yang melakukan perbuatan yang salah yang mengarah keperbuatan korupsi atau memberi kontribusi kepada perbuatan korupsi masyarakat tidak bertindak apa-apa, misalnya adanya pungutan uang tambahan dalam urusan-urusan perijinan, masyarakat memandang cuek kejadian-kejadian tersebut karena menganggap hal seperti ini adalah hal biasa. Masyarakat permissive terhadap terjadinya kondisi sangat konduktif untuk terjadinya korupsi.

Penyalahartian pengertian dalam budaya bangsa Indonesia juga sangat konduktif untuk menjadi korupsi. Pemahaman seperti ini sedikit banyak menjadikan banyak permissive terhadap praktek korupsi di Indonesia. Dampak berikutnya memang seseorang untuk mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatan korupsi yang dilakukan dengan dalil merupakan budaya timur. Misalnya pengertian kekeluargaan disalah artikan dengan pengertian dalam segala hal maka yang dinomorsatukan adalah keluarga atau kerabatnya. Apabila diwaktu kemudian ada yang mengetahui praktek seperti ini, maka dicari-cari alasan bahwa itu adalah budaya timur, budaya asli bangsa Indonesia. Misalnya lagi ada pengertian *mikul dhuwur mendem jero*, memang merupakan ungkapan budaya Jawa. Pengertian ungkapan tersebut kemudian disalah artikan, dengan pengertian bahwa apabila ada keluarga atau senior kita melakukan perbuatan korupsi, maka kita harus membantu menyembunyikan atau menutup-nutupi perbuatan tersebut. Hal seperti ini bukanlah pengertian yang salah dari ungkapan Jawa tersebut. Karena itu perlu adanya kajian tersendiri untuk mencegah jangan sampai pengertian-pengertian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di salah artikan atau dipelesetkan untuk kepentingan menutupi perbuatan korupsi.

3. Masih adanya Mafia Peradilan yang memungkinkan untuk melakukan pendekatan-pendekatan.

Penegakan hukum adalah pelaksanaan konkrit hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum oleh karena aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili. Sedang pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga masyarakat. Peradilan merupakan bagian penting dalam proses mengadili perkara, dimana hakim melakukan pemeriksaan terhadap

kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus maka waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.

Tugas utama peradilan adalah memberikan keadilan kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah (UU NO. 35 Tahun 1999). Sedang pengadilan merupakan salah satu paling utama bagi suatu Negara. Lembaga ini menjadi instrument vital sekaligus refleksi bagi banyak hal, seperti menegakkan hukum, pembangunan ekonomi, martabat dan moral bangsa, ketertiban dan sebagainya. Undang-undang atau berbagai kaidah hukum boleh tidak bagus, tetapi penegakan hukumnya haruslah prima, primanya penegakan hukum itu ditampilkan dalam berbagai putusan tepat dari institusi pengadilan. Artinya para hakim itu di pengadilan negeri dengan tepat dan ekstra bijak menjatuhkan putusan yang kemudian menjadi cermin bagi tegaknya hukum, munculnya *law and order*. Masalahnya untuk menghasilkan putusan pengadilan yang bagus, tidak bisa tidak, hakim harus memiliki kriteria yang lengkap. Harus cerdas, sebab dengan kecerdasan hakim dapat melihat suatu perkara dengan jernih dan tepat. Hakim harus menguasai bidangnya, punya kejujuran, hati nurani, bermoral tinggi, manusiawi dan *"welas asih"* yang kuat. Tanpa kriteria ini sulit diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim seharusnya memahami betul apa yang dikemukakan pujangga besar William Shakespeare, *I Stand here for law* (saya berdiri disini demi hukum)

E. Penutup

Sekarang ini pemerintah sangat mengandalkan penerimaan Negara dari sektor pajak bahkan pada tahun 2006, 80 % dari anggaran pendapatan dan belanja Negara merupakan penerimaan dari pajak. Maka agar supaya target tersebut terpenuhi aparat pajak harus berani bertindak tegas, meskipun terhadap orang yang secara ekonomi kuat, yaitu dengan

berani memberi sanksi "*Gijzeling*" karena sanksi ini menurut Rochmad Soemitro lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan/ psikologis dan martabat manusia. Orang

disandera karena utangnya kepada Negara/ masyarakat, oleh masyarakat dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap Negara yang sangat dicela dan mengurangi penghargaan terhadap diri pelanggar dan ini akan berakibat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Basah Syahrani. 1985. *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Galang Asmara. 2006. *Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan*. Yogyakarta: Laksabang Pressindo.
- Ilyas Wirawan. Dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmad. 1976. *Peradilan Administrasi dan Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang *Lembaga Paksa Badan*.